

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Firgelius Pianus Dhae¹, Yuniarti Reny Renggo^{2*}, Adrianus Kabubu Hudang³
^{1,2,3} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humanio
Korespondensi Author: renyrenggo@unkriswina.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan model data panel dari 22 Kabupaten/Kota selama periode 2017–2023. Penelitian ini menggunakan model ekonometrika untuk mengestimasi pengaruh pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan terhadap IPM, yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan dan kesehatan secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan IPM. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi peran penting alokasi anggaran pemerintah yang efisien dalam mendukung pembangunan manusia yang lebih merata. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal yang berfokus pada pendidikan dan kesehatan dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan manusia di Provinsi NTT.

Kata kunci: Pengeluaran Pemerintah; Indeks Pembangunan Manusia; Pendidikan; Kesehatan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of government spending in education and health on increasing the Human Development Index (HDI) in East Nusa Tenggara Province. Using panel data from several regencies/cities during the period 2017-2023, this study applies an econometric model to evaluate the contribution of government spending in education and health to the HDI, which includes dimensions of health, education, and standard of living. The results of the analysis show that increasing government spending in the education and health sectors significantly affects the increase in the HDI. This study also identifies the important role of efficient government budget allocation in supporting more equitable human development. These findings indicate that fiscal policies that focus on education and health can be the key to improving the quality of life and human development in NTT Province.

Keywords: Government Expenditure; Human Development Index; Education; Health.

PENDAHULUAN

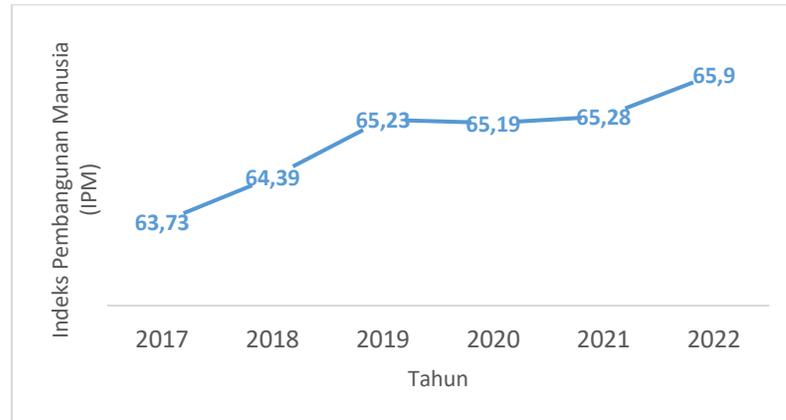
Salah satu kunci kemajuan suatu negara atau wilayah adalah pembangunan yang mana pembangunan merupakan alat agar tercapainya tujuan bangsa (Lubis *et al.*, 2024), dan sumber daya manusia ikut berperan dalam proses pembangunan (Jawak *et al.*, 2024). Seperti yang dikatakan oleh Hutasoit *et al.*, (2024) bahwa manusia sebagai fokus dan sasaran akhir yang ditetapkan dalam paradigma pembangunan, dimana dengan mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik merupakan suatu proses transisi dari pembangunan itu sendiri guna mensejahterakan masyarakat (Hasibuan & Syahbudi, 2022).

Pembangunan manusia menjadi konsep yang penting dimana manusia diposisikan sebagai suatu yang fokus dalam pembangunan, dan dalam pengukuran berhasil tidaknya upaya peningkatan kualitas hidup manusia indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi hal yang sangat penting (Harlina, 2024). IPM menjadi sangat penting dikarenakan menggabungkan tiga dimensi kehidupan manusia, yaitu dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, dan dimensi taraf hidup (Harsono *et al.*, 2024).

IPM sebagai salah satu alat ukur tingkat kesejahteraan suatu negara ditetapkan oleh *United Nation development Program* (UNDP) (Berutu *et al.*, 2024), dan manusia menjadi peran yang sangat penting dimana suatu bangsa akan menjadi bangsa yang maju atau bangsa yang mundur tergantung dari peran dan kualitas sumber daya manusia bangsa itu sendiri (Ulfatussaniah *et al.*, 2024).

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak tahun 2017 mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2020 sempat turun, namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 hingga tahun 2022. IPM pada tahun 2022 mengalami peningkatan 0,62 poin atau tumbuh 0.95 persen dibandingkan capaian tahun 2021, seperti yang terlihat pada Gambar 1.1. tentang IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur (BPS, 2023).

Gambar 1 IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2022 (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

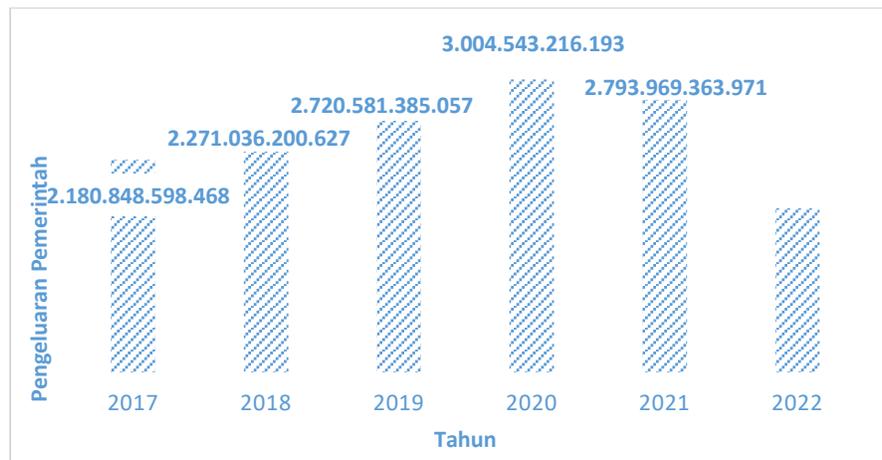
Berdasarkan gambar 1, Provinsi Nusa Tenggara timur mengalami peningkatan dalam IPM, namun pada tahun 2022 masih menduduki peringkat ke-32 nasional, untuk Provinsi NTT sendiri kota kupang menduduki peringkat 1 yang memiliki IPM tertinggi, diikuti Kabupaten Ngada sebagai Peringkat 2, dan Kabupaten Ende sebagai peringkat 3. Berdasarkan klasifikasi IPM menurut BPS, Provinsi NTT masih termasuk dalam klasifikasi sedang yang mana ranking IPMnya adalah $60 \leq \text{IPM} \leq 70$. Tingkat IPM menurun pada tahun 2020 yang menjadi penyebabnya adalah masalah virus korona yang melanda seluruh wilayah, dan tingginya stunting sekitar 37,8 persen. Provinsi NTT tergolong dalam IPM klasifikasi sedang, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Provinsi NTT sudah memiliki tingkat pembangunan manusia yang cukup baik namun masih harus dilakukan banyak perbaikan baik dari aspek kesehatan, pendidikan maupun standar hidup.

Strategi pembangunan perlu dipikirkan oleh pemerintah untuk mengatur dan membuat kebijakan yang dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Putri & Ichsan, 2023), salah satunya adalah dengan membuat kebijakan dalam pengeluaran pemerintah (Damayanti & Suryaningrum, 2023). Menurut Mongan (2019) terdapat 2 bidang yang perlu diperhatikan oleh pemerintah yaitu bidang pendidikan dan bidang kesehatan karena dianggap mampu untuk menciptakan sumber daya dan pembangunan manusia.

Pendidikan menjadi penting untuk diperhatikan karena pendidikan merupakan investasi sumber daya pada suatu waktu untuk meningkatkan produktivitas di masa depan (Renggo, 2013), dan IPM pendidikan dinilai berdasarkan 2 indikator yaitu lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Damayanti & Suryaningrum, 2023). Belanja pendidik menjadi perlu untuk dialokasikan oleh

pemerintah untuk mendukung sektor pendidikan (Harsono *et al.*, 2024) khususnya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan pengeluaran pendidikan diamanatkan pada UU No.20 tahun 2003 mengatakan bahwa sekurang- kurangnya 20 persen dari APBN maupun APBD (Prastiwi & Handayani, 2021).

Gambar 2. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan di Provinsi NTT
Tahun 2017 – 2022 (rupiah)



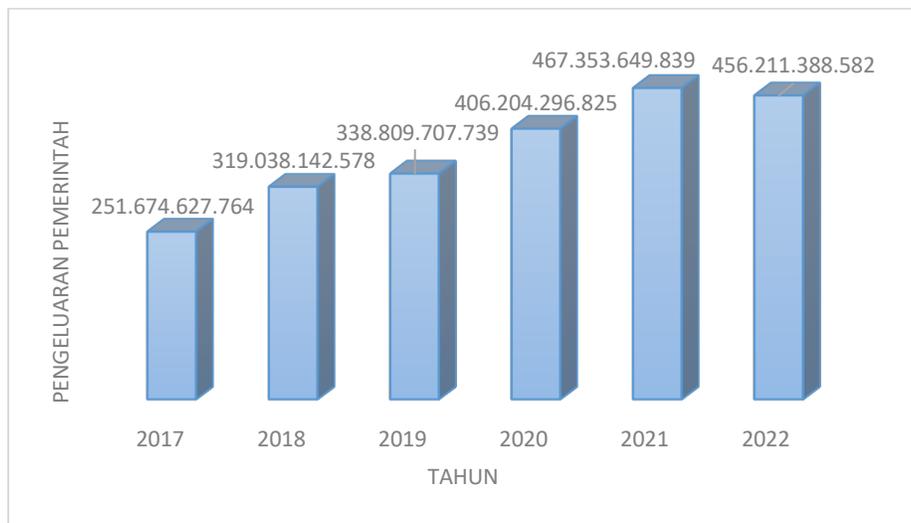
Sumber: Kementerian Keuangan, 2017 – 2022

Gambar 2 menunjukkan adanya fluktuasi yang terjadi dengan belanja pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bidang Pendidikan, dimana sejak 2017 pengeluaran mengalami peningkatan hingga 37% sampai pada tahun 2020, namun sampai 2022 pengeluaran pemerintah mengalami penurunan sebanyak 41%. Penurunan tersebut terjadi dikarenakan pandemic covid 19 yang terjadi sehingga menyebabkan banyak daerah terpaksa mengalihkan dana untuk penanganan pandemik dan pemulihan ekonomi.

Seperti yang dikatakan oleh Todaro dalam Lubis *et al.*, (2024) bahwa modal manusia selain Pendidikan indikator lainnya adalah kesehatan, yang mana indikator tersebut saling berkaitan, dimana Pendidikan dan kesehatan merupakan bentuk dari modal manusia dampak ganda dari pengeluaran kesehatan terhadap efektivitas sistem Pendidikan. Anggaran kesehatan diamanatkan melalui UU No.36 Tahun 2009 bahwa pemerintah mengalokasikan minimal 10% dari APBD (Prastiwi & Handayani, 2021).

Kesehatan menjadi indikator penting dimana dengan sumber daya manusia yang sehat secara fisik diharapkan mampu untuk ikut berperan dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan yang menjadi indikator dalam IPM adalah angka harapan hidup (AHH) saat manusia lahir (Harlina, 2024). Sehingga pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan menjadi penting guna meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan dan kemajuan dalam penanggulangan penyakit dan perawatan medis.

Gambar 3. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan di Provinsi NTT
Tahun 2017-2022 (rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2017-2022

Pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut gambar 3 memperlihatkan bahwa pengeluaran dalam bidang kesehatan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2017 hingga tahun 2021, dimana pada saat itu pemerintah berusaha untuk menanggulangi pandemic covid-19 yang terjadi. Menurut Dju *et al.*, (2023), peningkatan pengeluaran dalam bidang kesehatan dipergunakan untuk akses pelayanan KIA, rematri dan lansia, serta mengembangkan efektivitas pembiayaan kesehatan. Namun pada tahun 2022 pengeluaran dalam bidang kesehatan turun sebesar 2,3 persen.

Berdasarkan latar belakang, pendidikan dan kesehatan memiliki peran yang sangat besar untuk meningkatkan sumber daya manusia, karena sumber daya manusia yang berkualitas mampu mempengaruhi pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah. Sehingga pemerintah memiliki peran

yang cukup besar salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan pengelolaan keuangan untuk mendukung pendidikan dan kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami fluktuasi sejak tahun 2017 hingga tahun 2022, hal itu juga sejalan dengan perkembangan indeks pembangunan manusia yang juga mengalami fluktuasi jika dilihat dari tahun 2017 hingga tahun 2022.

Banyak penelitian telah dilakukan untuk melihat pengaruh antara pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan dan bidang kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia, ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh meningkatkan IPM (Ulfatussaniah *et al.*, 2024). Namun ada pula yang menemukan bahwa hanya pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan yang mampu mempengaruhi IPM (Damayanti & Suryaningrum, 2023)(Harlina, 2024)(Rahimah & Chandriyanti, 2020), begitu pun sebaliknya (Harsono *et al.*, 2024)(Mongan, 2019)(Maulina & Andriyani, 2020).

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bermaksud untuk menjawab Bagaimana Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan mempengaruhi Indeks Pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur ?

Keuangan Negara

Salah satu sumber daya yang dibutuhkan dalam pengelolaan negara adalah sumber daya keuangan, dan ini bukan hanya di Indonesia saja melainkan di seluruh dunia. Keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Ritonga, 2021).

Pengelolaan keuangan negara dapat dikelompokkan menjadi 3 sub bidang, yakni (Noviyanti & Gamaputra, 2020):

1. Sub bidang Pengelolaan Fiskal, meliputi kebijakan-kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan APBN mulai dari penetapan arah dan kebijakan umum, penetapan strategi dan prioritas pengelolaan APBN, penyusunan anggaran oleh pemerintah, pengesahan anggaran oleh DPR, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, penyusunan perhitungan anggaran negara, sampai pengesahan perhitungan anggaran negara menjadi Undang-Undang.

2. Sub bidang Pengelolaan Moneter, berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sektor perbankan dan lalu lintas moneter, baik di dalam maupun luar negeri.
3. Sub bidang kekayaan Negara yang dipisahkan, berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di sektor Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang berorientasi mencari keuntungan atau *profit oriented*.

Pada Dasarnya sistem keuangan negara bertumpu pada dua hal utama, yaitu (Effendie, 2017):

1. Penerimaan Negara, yang terdiri dari beberapa sumber diantaranya (a) pajak yang merupakan bagian terbesar dari sumber pendapatan negara, (b) retribusi yang menjadi sumber penerimaan negara ke2, dan (c) Keuntungan dari operasional BUMN.
2. Pengeluaran Negara, alokasi anggaran pada berbagai mata anggaran pengeluaran guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara agar terwujudnya kemakmuran yang adil dan beradab, yang mana pengelolaan keuangan negara tercermin dalam anggaran publik yang dikemas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Noviyanti & Gamaputra, 2020).

Pengeluaran Pemerintah

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara agar terwujudnya kemakmuran yang adil dan beradab, yang mana pengelolaan keuangan negara tercermin dalam anggaran publik yang dikemas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Noviyanti & Gamaputra, 2020), fungsi pemerintah adalah sebagai stabilisasi, alokasi dan distribusi (Jawak *et al.*, 2024).

Pengeluaran pemerintah dialokasikan setiap tahunnya dengan tujuan mensejahterakan rakyat (Ulfatussaniah *et al.*, 2024), yang mana pengeluaran pemerintah merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mendanai program pemerintah dan penyediaan layanan publik (Damayanti & Suryaningrum, 2023). Pengeluaran pemerintah juga merupakan cerminan biaya dari kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan (Hutasoit *et al.*, 2024), baik itu yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (BPS, 2023).

Dua komponen penting dalam anggaran negara, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan sosial dan ekonomi adalah Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan investasi masa depan, untuk mewujudkan perubahan mendasar dalam cara manusia hidup dan bertindak. Dimana dengan Pendidikan yang baik maka manusia mampu untuk menyesuaikan cara berpikirnya untuk mengembangkan segala potensi di agar dapat berperan dalam kehidupan (Maulina & Andriyani, 2020), dan Pendidikan formal merupakan suatu faktor yang mampu menghasilkan masyarakat berproduktivitas tinggi (Hutasoit *et al.*, 2024).

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa 20% anggaran dialokasikan Pendidikan, dan ini merupakan persentase yang cukup besar dimana pemerintah mau menjamin bahwa seluruh anak bangsa dapat bersekolah (Dju *et al.*, 2023). Dalam laporan realisasi pengeluaran pemerintah berdasarkan fungsi menurut kementerian keuangan, pengeluaran pemerintah dalam bidang Pendidikan terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Modal, dan belanja lainnya dalam bidang Pendidikan.

Anggaran pendidikan melalui TKDD terdiri atas beberapa komponen, yaitu (1) Dana Transfer Umum (yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) yang diperkirakan untuk bidang pendidikan; (2) Dana Transfer Khusus; (3) Dana Insentif Daerah sektor pendidikan; dan (4) Dana Otonomi Khusus yang diperkirakan untuk bidang pendidikan sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan terkait otonomi khusus.

Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan

Selain pendidikan, kesehatan juga sangat dibutuhkan oleh manusia, karena kesehatan merupakan salah satu variabel pendukung meningkatkannya nilai tambah barang dan jasa (Dju *et al.*, 2023). Pembangunan di bidang kesehatan diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Harsono *et al.*, 2024).

Pemerintah wajib menyediakan sarana prasarana kesehatan, yang tercermin dalam pengeluaran pemerintah (Hutasoit *et al.*, 2024), yang mana pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar masyarakat dimana masyarakat

dapat memperoleh pekerjaan yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Maulina & Andriyani, 2020).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis komponen dasar kualitas hidup (Berutu *et al.*, 2024), dan telah diperkenalkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) sejak tahun 1990 dengan angka berkisar 0 hingga 100 (Hutasoit *et al.*, 2024). Indonesia menghitung IPM sebagai hasil kerja sama antara BPS dan UNDP (Hasibuan & Syahbudi, 2022).

Capaian IPM dilihat dari beberapa kategori, yaitu (Ulfatussaniah *et al.*, 2024):

1. IPM Rendah : $IPM < 60$
2. IPM Sedang : $60 \leq IPM \leq 70$
3. IPM Tinggi : $70 \leq IPM < 80$
4. IPM Sangat Tinggi : $IPM \geq 80$

Sejak tahun 2010, perhitungan IPM dilakukan dengan menggunakan metode baru, yang mana komponennya adalah angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata sekolah, dan pengeluaran perkapita (BPS, 2023),

Sebagai alat ukur yang mampu menunjukkan persentase pencapaian dalam pembangunan manusia, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perlu untuk memperhatikan beberapa Faktor (Yektiningsih, 2018):

Tabel 1 Kriteria Komponen Pembangunan Manusia

| Faktor | Komponen | Maksimum | Minimum |
|--------------------|----------------------------|------------|-----------|
| Kelangsungan Hidup | Angka Harapan Hidup (AHH) | 85 | 20 |
| Pengetahuan | Harapan Lama Sekolah (HLS) | 18 | 0 |
| | Rata-rata Lama Sekolah | 15 | 0 |
| Daya Beli | Pengeluaran Perkapita | 26.572.352 | 1.007.436 |

Penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang bisa dijadikan acuan. Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan:

1. Maulina & Andriyani (2020), untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia, dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia, belanja pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia, dan tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia.
2. Putri & Ichsan (2023), untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh. Dengan menggunakan data panel hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Aceh. Pemerintah Aceh diharapkan lebih konsisten dan intensif dalam meningkatkan IPM melalui program-program yang terkait dengan aspek ekonomi, kesehatan dan pendidikan.
3. Lubis *et al.* (2024), untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara. Dengan menggunakan data panel hasil menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan tidak memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara.
4. Ulfatussaniah *et al.*(2024), untuk melihat pengaruh pemerintah pada sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di pulau Sumatera yaitu provinsi Aceh, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Dengan menggunakan rentang waktu 5 tahun yaitu tahun 2017 – 2021 hasil menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan pendidikan

- berpengaruh positif sedangkan sektor infrastruktur dan kemiskinan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia.
5. Harlina (2024), untuk mengetahui pengaruh dari tingkat pendidikan, kesehatan masyarakat, dan pendapatan per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sumbawa Barat. Disimpulkan bahwa secara parsial pendidikan maupun pendapatan per kapita berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan variabel kesehatan secara parsial tidak berpengaruh. Untuk pengaruh simultan, variabel pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita secara bersama-sama berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sumbawa Barat.

Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap IPM

Meningkatnya pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dalam bentuk pembangunan sekolah, penyediaan fasilitas sekolah, pelatihan guru, dan kurikulum yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan akses yang lebih baik dan pendidikan berkualitas, dan makin banyak masyarakat untuk dapat menyelesaikan pendidikan lebih tinggi atau yang dimaksud adalah mampu meningkatkan rata – rata lama sekolah. Selain itu juga dengan fasilitas yang mendukung mampu untuk memberikan dukungan bagi anak- anak sehingga minat sekolah meningkat.

Seperti yang dikemukakan oleh Hasibuan & Syahbudi (2022), bahwa semakin tinggi pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan maka akan berpengaruh meningkatkan IPM. Maka hipotesis yang diambil untuk menggambarkan hubungan antara pengeluaran pendidikan terhadap IPM adalah, pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan berpengaruh Positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

H1 : Pengeluaran Pemerintah dalam bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan IPM

Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap IPM

Semakin besar pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan seperti Penyediaan fasilitas kesehatan contohnya membangun rumah sakit, klinik dan pusat kesehatan yang dilengkapi peralatan medis yang modern dapat meningkatkan angka harapan hidup, karena masyarakat lebih mudah untuk mengakses fasilitas kesehatan.

Selain itu pengeluaran pemerintah juga dalam program khusus kesehatan ibu dan anak mampu meningkatkan kesehatan ibu hamil, bayi baru lahir, dan anak-anak yang akan berdampak langsung pada menurunnya angka kematian ibu dan anak.

Seperti yang dikemukakan oleh Harsono *et al.* (2024), bahwa semakin tinggi pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan maka akan berpengaruh meningkatkan IPM. Maka hipotesis yang diambil untuk menggambarkan hubungan antara pengeluaran kesehatan terhadap IPM adalah, pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

H2 : Pengeluaran Pemerintah dalam bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan IPM

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder. Sumber data sekunder tersebut berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kementerian dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)-Kementerian Keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *panel* menggabungkan data *time series* dan data *cross section* (Gujarati, 2022). Data *time series*, yakni periode tahun 2017 hingga 2023 di dan data *cross section*, yakni 21 kabupaten dan 1 kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program EViews8. Untuk menguji hipotesis maka diperlukan rumus pengujian statistik yaitu sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \alpha + \beta_1 PENDING_{it} + \beta_2 PENKES_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

IPM_{it} : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota i pada tahun t (sebagai variabel dependent)

$PENDING_{it}$: Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan Kabupaten/Kota i pada tahun t

$PENKES_{it}$: Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan Kabupaten/Kota i pada tahun t

α : Intersep konstanta kabupaten/kota i

β_1, β_2 : koefisien regresi

ε_{it} Error term

Besarnya pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan dan sektor kesehatan berpengaruh terhadap IPM di Nusa Tenggara Timur dapat dilihat dengan terlebih dahulu dilakukan penaksiran model. Pengujiannya meliputi : 3 model pendekatan yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Dimana untuk memilih model mana yang terbaik untuk digunakan dalam data panel maka akan dilakukan Uji Chow dan Uji Hausman. Uji Chow merupakan uji yang digunakan untuk menentukan antara FEM dan CEM, sedangkan Uji Hausman merupakan pengujian untuk memilih apakah FEM atau REM yang paling tepat digunakan.

Uji Chow

Pengujian (*uji chow*) sering digunakan untuk menentukan apakah variabel independen mempunyai dampak yang berbeda terhadap subkelompok populasi yang berbeda, biasanya dipakai untuk memilih model yang paling cocok dipakai dalam data panel *Fixed Effect Model* atau *Common Effect Model*. Uji Chow dilakukan dengan membandingkan nilai F-statistik yang dihitung dengan nilai kritis dari F-tabel atau nilai probabilitas *cross section F*. Dasar pengambilan keputusan dalam uji chow dilihat dari nilai probability *cross-section F*:

- Jika nilai probabilitas *cross section F* > dari α (0,05) maka model yang dipilih adalah pendekatan *Common Effect Model*.
- Jika nilai probabilitas *cross section F* < dari α (0,05) maka model yang dipilih adalah pendekatan *Fixed Effect Model*.

Uji Hausman

Uji hasuman dilakukan setelah melakukan uji chow untuk mengetahui model yang tepat digunakan apakah *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Dasar pengambilan keputusan dalam uji hausman dilihat dari nilai probability *cross-section random*:

- Jika nilai probabilitas *cross section random* > dari α (0,05) maka model yang dipilih adalah pendekatan *Random Effect Model*.
- Jika nilai probabilitas *cross section random* < dari α (0,05) maka model yang dipilih adalah pendekatan *Fixed Effect Model*.

Uji Langrange Multiple (LM)

Untuk menentukan apakah REM lebih baik dari CEM digunakan *Lagrange Multiplier test* (LM). Uji signifikansi Random efek ini dikembangkan oleh Breusch Pagan. Metode *Breusch Pagan* menguji signifikansi *Random effect* didasarkan pada nilai residual dari metode *Common effect*. Hipotesisnya sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Random Effect Model*

Uji LM ini didasarkan pada distribusi chi-square dengan derajat kebebasan sama dengan jumlah variabel independen. Jika nilai statistik LM lebih besar dari nilai chi-square kritis maka kita H_0 ditolak, yang berarti estimasi regresi data panel yang lebih akurat adalah *Random Effect Model*. Sebaliknya jika statistik LM lebih kecil dari nilai kritis statistik chi-square maka kita menerima H_0 yang berarti *Common Effect Model* lebih baik digunakan dalam regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Estimasi data panel dilakukan dengan memilih beberapa model yang tepat untuk digunakan, terdapat beberapa model dalam analisis data panel yaitu model *common effect model* (CEM), model *fixxed random effect* (FEM), dan model *random effect model* (REM). Beberapa model tersebut akan diuji untuk melihat model mana yang terbaik untuk dianalisis, dengan menggunakan beberapa pengujian yaitu uji *Chow*, Uji *Hausman* dan Uji *Langrange Multiple* (LM).

Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menguji apakah model *common effect model* (CEM) atau *fixxed random effect* (FEM), yang lebih baik untuk digunakan. Berikut hasil uji *chow* dari penelitian ini adalah:

Tabel 2 Tabel Uji Chow

| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
|--------------------------|------------|----------|--------|
| Cross-section F | 30.550859 | (21,130) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 274.257122 | 21 | 0.0000 |

Berdasarkan tabel 4.1. maka dapat dilihat bahwa probabilitas Cross-section Chi-square sebesar 0,000 dan lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ (0,05) yang artinya adalah dari model CEM dan FEM maka yang terbaik untuk dianalisis adalah model FEM.

Model FEM menandakan bahwa model ini mempertimbangkan efek individu tapi waktu tetap. Efek individu mengasumsikan bahwa tiap unit cross-section memiliki karakteristik unik yang tidak bisa diobservasi, tapi tetap konsisten dari waktu ke waktu. Sedangkan waktu tetap artinya model tidak fokus pada perubahan antar tahun, tapi pada perbedaan antar daerah, yang dianggap tetap selama periode waktu penelitian.

Uji Hausman

Setelah melakukan uji Chow dan model yang terpilih adalah FEM, maka langkah berikutnya adalah melakukan uji lanjutan untuk melihat apakah model FEM lebih baik dari pada model REM dengan menggunakan uji *hausman*. Berikut hasil uji *chow* dari penelitian ini adalah:

Tabel **Error! No text of specified style in document.**1 Tabel Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|----------------------|-------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 1.659449 | 2 | 0.4362 |

Berdasarkan tabel 4.2. disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah model *Random Effect Model* (REM) dibandingkan dengan model FEM. Disimpulkan dari nilai probabilitas Cross-section random sebesar 0,4362 yang lebih besar dari $\alpha = 5\%$ (0,05). Model REM mengasumsikan bahwa perbedaan karakteristik kabupaten itu ada, tapi bersifat acak (random) dan tidak berkorelasi dengan variabel independen (pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan). Jadi, tidak seperti FEM yang memberi masing-masing unit efek tetap (dengan intercept-nya sendiri), REM menganggap bahwa semua unit berasal dari populasi yang sama tapi memiliki gangguan random yang berbeda-beda.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan data sampel. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah ada cukup bukti dalam data sampel untuk mendukung pernyataan atau klaim tertentu tentang populasi.

Uji Signifikansi

Agar dapat mengetahui apakah variabel pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan dan variabel pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka perlu untuk melakukan uji signifikan (Rahimah & Chandriyanti, 2020), yang terdiri dari Uji F, Uji R², dan Uji t. Berdasarkan hasil pemilihan model yang terpilih adalah model REM, berikut persamaan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis:

$$\begin{aligned} \text{IPM}_{it} &= \alpha + \beta_1 \text{PENDIK}_{it} + \beta_2 \text{PENKES}_{it} + \varepsilon_{it} \\ &= 56,67669 + 1,94\text{E-}11 + 1,55\text{E-}11 + \varepsilon_{it} \\ \text{Prob.} &: \quad \quad \quad 0.0001 \quad \quad \quad 0.0014 \\ \text{R-squared} &: 0,205927 \\ \text{Prob(F-statistic)} &: 0,000000 \end{aligned}$$

Uji F

Uji F digunakan untuk memprediksi apakah dalam model regresi data panel secara keseluruhan layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan dapat juga dilakukan dengan nilai signifikansi (*p-value*). Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, nilai Prob(F-statistic) sebesar 0.000000, dan itu $\leq \alpha = 5\%$ (0,05). artinya adalah H₀ ditolak atau hasil uji F signifikan, sehingga model regresi data panel layak digunakan. Atau variabel pengeluaran pemerintah dalam bidang penelitian dan kesehatan dapat dilihat pengaruhnya terhadap IPM.

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Koefisien Determinasi merupakan salah satu ukuran statistik yang digunakan untuk menilai seberapa baik model regresi menjelaskan variasi variabel IPM berdasarkan variabel variabel pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Tujuan dari koefisien determinasi adalah mengukur kebaikan model (*goodness of fit*). Berdasarkan hasil analisis regresi, nilai R² adalah 0,205927 yaitu berada pada $0 < R^2 < 0,5$ memiliki interpretasi bahwa model kurang baik, hanya menjelaskan Sebagian kecil atau 20% variabilitas, sedangkan 80% lainnya dijelaskan oleh variabel yang berada diluar dari model.

Hal ini bisa saja disebabkan karena variabel yang digunakan dalam model regresi data panel ini masih sangat sedikit, atau hanya ada 2 variabel saja yaitu variabel pengeluaran pemerintah dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan saja, sedangkan variabel yang mempengaruhi IPM bisa sangat banyak seperti Produk Domestik Regional Bruto (Prastiwi & Handayani, 2021), Desentralisasi Fiskal (Putri & Ichsan, 2023), kemiskinan (Berutu *et al.*, 2024), Pendapatan perkapita (Harlina, 2024), belanja bantuan sosial (Harsono *et al.*, 2024), dan jumlah penduduk (Hutasoit *et al.*, 2024).

Uji t

Uji t merupakan uji statistic inferensial yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata suatu kelompok berbeda secara signifikan dari nilai tertentu atau dari rata-rata kelompok lain, atau untuk menguji apakah suatu koefisien regresi secara signifikan berbeda dari nol. Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah variabel pengeluaran pemerintah dalam bidang Pendidikan, variabel pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan memiliki pengaruh terhadap variabel IPM.

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, dengan melihat nilai probabilitas setiap variabel diperoleh bahwa:

1. Variabel pengeluaran pemerintah dalam bidang Pendidikan memiliki nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0.0001, yang $\leq \alpha = 5\%$ (0.05). artinya adalah variabel pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan signifikan mempengaruhi variabel IPM.
2. Variabel pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan memiliki nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0.0014, yang $\leq \alpha = 5\%$ (0.05). artinya adalah variabel pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan signifikan mempengaruhi variabel IPM.

Pembahasan

Penelitian dengan judul Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap IPM Kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam kurun waktu tertentu. IPM adalah indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi

dasar, yang berfungsi sebagai indikator kesejahteraan manusia. Semakin tinggi IPM, semakin baik kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut.

Konstanta sebesar 56,67669 memiliki makna Jika pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan adalah nol dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan juga nol, maka nilai IPM rata-rata diperkirakan sebesar 56,67669.

β_1 adalah sebesar 1,94E-11, agar dapat terbaca secara lebih realistis maka dapat disesuaikan dengan satuan dalam data yang dianalisis yaitu per Rp 1 Miliar. Karena 1 miliar = 1.000.000.000 maka perhitungan matematisnya adalah

$$1,94 \times 10^{-11} \times 1.000.000.000 = 0,0194$$

Oleh karena itu setiap kenaikan pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan sebesar 1.000.000.000 (1 miliar) maka akan meningkatkan IPM sebesar 0,019 poin. IPM tidak memiliki satuan fisik seperti kg, meter, atau rupiah sebab IPM merupakan indeks yang komposit, karena merupakan gabungan yang dibuat dari beberapa indikator berbeda dan masing-masing indikator mewakili aspek tertentu dari suatu fenomena, dan untuk mengukur indikator pendidikan diwakili oleh Rata-rata lama sekolah (pendidikan yang telah ditempuh) dan Harapan lama sekolah (pendidikan yang diharapkan akan ditempuh)

Meskipun nilai koefisien sebesar 0,0194 terlihat relatif kecil, namun dalam konteks Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cenderung bergerak secara perlahan dan stabil, peningkatan tersebut memiliki arti yang signifikan. IPM merupakan indeks komposit yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang, sehingga perubahan sekecil apa pun mengindikasikan kemajuan pembangunan manusia. Apabila pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan ditingkatkan secara konsisten dari tahun ke tahun, maka akumulasi dampaknya dapat menghasilkan peningkatan IPM yang lebih besar dan berkelanjutan.

Hal ini juga menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan memberikan hasil yang nyata terhadap pembangunan manusia, khususnya dalam aspek pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah). Apabila Provinsi Nusa Tenggara Timur ingin mengalami dampak yang besar, maka pemerintah harus menambah anggaran pendidikan sebesar Rp. 100 miliar, maka IPM akan meningkat sebesar $0.0194 \times 100 = 1.94$ poin. Ini adalah lonjakan besar dalam IPM, mengingat perubahan tahunan IPM biasanya hanya sekitar 0,5–1 poin.

Peningkatan pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan terbukti secara empiris mampu mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur, meskipun dengan nilai kenaikan yang relatif kecil per satuan rupiah. Hal ini menekankan pentingnya keberlanjutan dan efektivitas kebijakan anggaran di sektor pendidikan sebagai pendorong pembangunan jangka panjang, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah & Wasil (2024) dan Nursita *et al.* (2025).

Pengaruh positif ini tidak terjadi di setiap provinsi/kabupaten yang ada di Indonesia, seperti yang ditemukan oleh Apriska *et al.* (2024) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dengan menggunakan data tahun 2013 – 2022, menemukan bahwa pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan memiliki pengaruh signifikan menurunkan IPM. Sama juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktafiyana & Muliati (2024) di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan menggunakan data tahun 2010 – 2021, menemukan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan juga berpengaruh signifikan menurunkan IPM.

Pengaruh Variabel Pengeluaran Pemerintah dalam bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hasil regresi data panel mengatakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan berpengaruh signifikan meningkatkan IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nilai koefisien sebesar 1,55 menandakan bahwa apabila pengeluaran pemerintah meningkat sebesar Rp 1 rupiah maka akan berpengaruh signifikan meningkatkan IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,55.

Nilai koefisien dari hasil regresi adalah sebesar 1.55E-11, agar dapat lebih terbaca secara lebih realistis maka dapat disesuaikan dengan satuan dalam data yang dianalisis yaitu per Rp 1 Miliar. Karena 1 miliar = 1.000.000.000 maka perhitungan matematisnya adalah

$$1,55 \times 10^{-11} \times 1.000.000.000 = 0.0155$$

Oleh karena itu setiap kenaikan pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan sebesar 1.000.000.000 (1 miliar) maka akan meningkatkan IPM sebesar 0.015 poin dan indikator yang mewakili kesehatan adalah angka harapan hidup saat lahir.

Meskipun secara numerik terlihat kecil, peningkatan ini memiliki arti penting mengingat IPM merupakan indeks yang bergerak secara perlahan dan stabil. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pemerintah dalam sektor kesehatan tetap memberikan dampak positif terhadap

pembangunan manusia, khususnya pada peningkatan usia harapan hidup masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sebagaimana diketahui, kesehatan merupakan salah satu komponen utama dalam pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor ini menunjukkan perhatian terhadap peningkatan layanan kesehatan, gizi, sanitasi, dan akses terhadap fasilitas medis. Dampak dari investasi ini tercermin dalam meningkatnya angka harapan hidup, yang selanjutnya memberikan kontribusi positif terhadap kenaikan nilai IPM secara keseluruhan.

Sebagai ilustrasi, apabila Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ingin meningkatkan IPM secara signifikan, maka penambahan anggaran kesehatan sebesar Rp100 miliar diperkirakan akan meningkatkan IPM sebesar 1,55 poin ($0,0155 \times 100$). Temuan ini menunjukkan bahwa intervensi fiskal di sektor kesehatan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachman (2024), bahwa untuk Indonesia secara keseluruhan peningkatan pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan IPM. Provinsi Lampung pun memiliki pengaruh yang sama yaitu peningkatan pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan akan secara signifikan meningkatkan IPM, seperti yang dikemukakan oleh Pratama (2025) dengan menggunakan data tahun 2017 – 2022.

Tidak semua daerah memiliki pengaruh yang sama, seperti di Sulawesi Utara dengan menggunakan data tahun 2008 – 2017 mendapatkan hasil bahwa pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan berpengaruh signifikan dalam menurunkan IPM (Pelenewen et al., 2018). Begitupun Lubis et al. (2024) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan tidak berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Sumatera Utara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan beberapa hal; (1) Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan berpengaruh signifikan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur; (2) Pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan berpengaruh signifikan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu beberapa saran diberikan antara lain (i) Pemerintah daerah

perlu menambah porsi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan secara berimbang, mengingat kedua sektor ini terbukti mampu mendorong peningkatan IPM secara signifikan; (ii) Pada sektor pendidikan, fokus pengeluaran sebaiknya diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar hingga menengah, penyediaan beasiswa, serta peningkatan kapasitas guru; (iii) Di sektor kesehatan, pengeluaran dapat difokuskan pada peningkatan layanan kesehatan primer, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta pencegahan dan penanganan penyakit menular; (iv) Pemerintah perlu melakukan perencanaan dan pengawasan yang lebih baik terhadap penggunaan anggaran di kedua sektor agar dana yang dialokasikan benar-benar berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat; (v) Peningkatan IPM membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk dinas pendidikan, dinas kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriska, L., Irwan, M., Suprapti, I. A. P., & Anggara, J. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Kabupaten / Kota Di Provinsi NTB). *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora)*, 10, 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jseh.v10i1.451>
- Berutu, E., Putri, R. Y., Maulana, M. S., Asnidar, A., & Ridha, A. (2024). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Sumatera Barat. *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(1), 236–248. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/menawan.v2i1.181>
- BPS. (2023). *Nusa Tenggara Timur Dalam Angka Tahun 2023*. BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Damayanti, A. P., & Suryaningrum, D. H. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *Jurnal Maneksi*, 12(3), 614–627.
- Dju, Y. P., Hudang, A. K., & Renggo, Y. R. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Sektor Pendidikan Terhadap PDRB dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 74–86.
- Effendie, H. (2017). *Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Komprehensif dan Terpadu* (Cetakan Pe). Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga (AUP).
- Firmansyah, A. H., & Wasil, M. (2024). Pengaruh Belanja Pemerintah dan PDRB Terhadap Peningkatan IPM di Indonesia Timur Barat dan Timur. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/jrei.v5i1.13048>
- Gujarati, D. N. (2022). *Essential Of Econometrics* (R. Lee (ed.); Fifth Edit). SAGE Publications.
- Harlina, G. (2024). Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan Masyarakat, dan Pendapatan per

- Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sumbawa Barat. *GLORY (Global Leadership Organizational Research in Management)*, 2(1), 66–77.
- Harsono, I., Purnama, I., Firmansyah, M., Irwan, M., & Sutanto, H. (2024). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi NTB Tahun 2013-2022. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1), 802–810.
- Hasibuan, S. A., & Syahbudi, M. (2022). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(4), 1158–1166. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i4.13218> Volume
- Hutasoit, D. H., Sitanggang, E., Sugara, W. H., Margaret, P. S., & Silaban, J. (2024). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk , Pengeluaran Pemerintah dan Gini Ratio Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2022. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(1), 200–209.
- Jawak, A. Y. P. br, Zendrato, F., Ruslan, D., & Sari, R. L. (2024). Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Pengeluaran Pemerintah terhadap Index Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara. *EKUILNOMI : Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(1), 46–52.
- Lubis, C. K. S., Sari, C. M., Syahfitri, T. I., & Suhariato, J. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara Tahun 2019-2022. *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1), 738–755.
- Maulina, U., & Andriyani, D. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan TPAK Terhadap IPM di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, XI(01), 28–37.
- Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Indonesia Treasury Review*., 4(2), 163–176.
- Noviyanti, & Gamaputra, G. (2020). *Administrasi Keuangan Negara*. Unesa University Press.
- Nursita, L., Wael, M. W., Amanda, D., Wahyuni, R., & Amri, M. (2025). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Bandung (2013-2022). *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)*, 10(1), 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.31932/jpe.v10i1.3392>
- Oktafiyana, E., & Muliati. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan serta Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 20(1), 88–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jinv.v20i1.1692>
- Pelenewen, T. O. M., Walewangko, E. N., & Sumual, J. I. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Ipm Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(04), 52–61.

- Prastiwi, S. A. T., & Handayani, H. R. (2021). Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan dan PDRB Terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus 35 Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal Of Economics*, 10(4), 91–103.
- Pratama, M. I. (2025). Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung : Belanja Pendidikan , Belanja Kesehatan , Kemiskinan dan Produk Domestik Regional Bruto. *JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 8(1), 34–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1782> Indeks
- Putri, H. P., & Ichsan. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 06(2), 1–12.
- Rachman, A. M. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan di Indonesia. *Bulletin of Community Engagement*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.51278/bce.v4i1.1266>
- Rahimah, & Chandriyanti, I. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Tingkat Kemiskinan, dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Banjarmasin. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 804–818.
- Renggo, Y. R. (2013). Analisis Pengeluaran Pemerintah Terhadap Human Development Indeks (HDI) di Indonesia. *Transformatif*, II(2), 1–16.
- Ritonga, P. (2021). *Keuangan Negara* (Arifin (ed.); Cetakan Pe). UMSU Press.
- Ulfatussaniah, A., Murwiati, A., & Wahyudi, H. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Kesehatan , Pendidikan , Infrastruktur dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten / Kota di Tiga Provinsi Termiskin di Pulau Sumatera. *Journal on Education*, 06(03), 16720–16729.
- Yektiningsih, E. (2018). Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan Tahun 2018. *Ilmiah Sosio Agribisnis*, 18(2), 32–50. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30742/jisa1822018>